



BPK Mulai Periksa Penggunaan Dana Desa



ERTEMUAN - Tim BPK Bali melakukan pertemuan dengan Penjabat Bupati Tabanan mengawali tahapan pemeriksaan penggunaan anggaran dana desa.

Tabanan (Bali Post) -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mulai menurunkan timnya untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana desa yang pendistribusiannya sudah hampir mendekati 100 persen. Pemeriksaan ini untuk melihat kesiapan masing-masing desa menjalankan program yang dibiayai dana tersebut.

Tabanan menjadi kabupaten pertama yang mendapatkan pemeriksaan bersama Kabupaten Buleleng. Tim yang dipimpin Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bali Amri Lewa, Senin (9/11) kemarin mengawali tahapan pemeriksaan dengan bertemu Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada di ruang kerjanya.

Kedatangan tim dari BPK juga disambut Sekda Kabupaten Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa,

Asisten I Setda I Wayan Yatnanadi, dan Asisten III Setda I Made Sukada. Hadir Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) I GN Supanji, dan Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tabanan I Wayan Arimbawa. Pemeriksaan berlangsung 35 hari.

Penjabat Bupati Tabanan mengungkapkan rasa

terima kasihnya kepada BPK yang mempercayakan Tabanan sebagai daerah pertama yang mendapatkan pemeriksaan. "Itu bukan menjadi persoalan. Justru sebaliknya, kami bersyukur mendapat kesempatan pertama. Apa yang kurang dan apa yang menjadi kelemahan dalam penggunaan dana desa bisa diketahui untuk diperbaiki," tegasnya.

Menurutnya, sebelum berlakunya Undang-undang Desa, Pemkab Ta-

banan sudah berkomitmen dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih Minggu (8/11) diluncurkan pemilihan perbekel atau kepala desa secara serentak. "Dana desa sejauh ini realisasinya sudah 80 persen. Mengingat akhir tahun semakin dekat dan banyak hari raya, kami berharap pemeriksaan berjalan efektif selama sebulan,"

ujar Sugiada.

Sementara itu, Amri Lewa berharap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya difasilitasi oleh BPMPD selaku *leading sector* pemerintahan desa. "Berapa dana yang diterima dari APBN, berapa yang

diterima desa, dan dipakai untuk apa saja," bebernya.

Dia mengungkapkan, tidak ada alasan khusus mengapa Tabanan dipilih sebagai daerah pertama yang diperiksa bersama Buleleng. Namun, diperkirakan kedua kabupaten ini mengelola dana desa cukup besar. "Mungkin pertimbangannya faktor luas wilayah dan jumlah desa yang begitu besar di Tabanan. Pada tahap awal ini penerapan dana desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan yang muncul inilah yang perlu kami sampaikan ke pusat nantinya," tandasnya. (kmb28)



Dana Kompensasi SUTT Celukan Bawang Tak Cair

Sebut PLN Bohong, Warga Abianbase Datangi Dewan

Mangupura (Bali Post) -

Sejumlah warga Abianbase, Mengwi, Senin (9/11) kemarin mendatangi gedung DPRD Badung. Kedatangan warga yang didampingi *prajuru* desa ini, lantaran pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai bohong tidak memenuhi janji terkait dana kompensasi kabel SUTT yang melintas di permukiman warga. Kehadiran belasan warga Banjar Cica, Desa Abianbase, Mengwi itu, diterima anggota Komisi I DPRD Badung Made Subawa, Nyoman Kariana, dan Wakil Ketua Made Sunartha di ruang rapat Gosana II.

Namun, Sunartha yang juga Bendesa Adat Abianbase meninggalkan ruang rapat setelah menerima kedatangan warga. *Petajuh Pawogan* Abianbase Ketut Mulyadi yang hadir bersama warga menerangkan kepada Dewan jika di wilayahnya telah melintas jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Celukan Bawang-Kapal Span Tower. Sebelum pembangunan tersebut, telah

disepakati dana kompensasi terhadap lahan yang dilintasi. "Kami merasa dibohongi oleh PLN Unit Induk Pembangunan VII, karena kesepakatan itu sudah dilakukan pada 9 Oktober 2014, namun warga kami hingga kini belum menerima dana itu (dana kompensasi - red)," ungkapnya.

Sekretaris Desa Adat Abianbase Putu Raka yang turut menghadiri pertemuan itu membenarkan peri-

hal tersebut. Bahkan, menurutnya, pemasangan jaringan kabel listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bali ini sempat ditolak warga. merasa.

Manager PLN Mengwi Wayan Netra saat dimintai konfirmasi mengaku tidak membidangi jaringan SUTT. Ia pun memberikan nomor kontak Wayan Budastra, rekan sejawatnya yang dikatakannya me-

ngani jaringan SUTT di lapangan. Budastra saat dihubungi justru membantah jika ada warga yang belum mendapatkan dana kompensasi. "Kalau warga yang ini (warga Abianbase - red) sebenarnya sudah dapat, enggak tahu yang mana yang tidak dapat. Kalau semua data yang ada, sudah dapat. Yang memberikan data itu tidak ada di kantor, masih di lapangan," jelasnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 10 November 2015
Hal : 3



Pemanfaatan Dana Desa Wabup Kasta Pimpin Tim Monev

Semarapura (Bali Post) -

Hingga saat ini masih banyak kaur yang belum paham mengelola dana desa. Hal ini terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pemerintahan desa yang digelar di Desa Timuhun dan Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Senin (9/11) kemarin. Kegiatan monev dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan dan administrasi dana desa dari pusat.

Monev dipimpin Wakil Bupati Klungkung Made Kasta didampingi anggota tim monev dan Camat Banjarangkan Ida Bagus Mas Ananda. Tim diterima perbekel, BPD, dan LPM Desa Timuhun dan Desa Bakas.

Perbekel Desa Timuhun, Putu Arsana, mengungkapkan, dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Desa yang baru, diperlukan pemahaman kaur desa dalam memahami pelaksanaan juklak dan juknisnya. Untuk itu pihaknya berharap diberikan pemahaman terkait mekanisme pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah desa dengan aturan yang ada.

Made Kasta menyatakan, dengan adanya UU Pemerintah Desa, perlu dilaksanakan bimtek dalam penggunaan

anggaran, sehingga pengelola keuangan paham akan aturan dan pengelolannya. "Jangan sampai dana yang turun ke desa nanti menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Menyangkut tata tertib (tatib) yang belum dimiliki beberapa BPD, wabup berharap segera dibuatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. "Perbekel dan BPD harus saling koordinasi, sehingga apa pun program yang dirancang dapat berjalan sesuai prosedur," katanya.

Sementara itu, dari hasil monev di beberapa desa yang menyangkut empat bidang, yakni penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan desa, Kasta menilai sudah berjalan dengan lancar. Monev bukan sekadar pemeriksaan, tetapi sebuah pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan di desa. (dwa)

Edisi : Selasa, 10 Nov 2015

Hal : 10



Perbaikan Telan Rp 1,8 Miliar Jalan Slati-Tanggahan Talangjiwa Rusak

Bangli (Bali Post) -

Jalan penghubung Banjar Slati Desa Bunutin Bangli-Banjar Tanggahan Talangjiwa Desa Demulih Susut dikeluhkan warga. Pasalnya jalan yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu dan menelan anggaran Rp 1,8 miliar ini rusak berat dan bergelombang.

Berdasarkan pantauan, jalan bergelombang dan mengelupas terlihat di sejumlah titik. Di samping itu, beton yang dipasang pada bahu jalan juga retak. Warga setempat, Wayan Dinata mengatakan di samping kualitasnya yang buruk, jalan ini juga dinilai membahayakan. Sebab tanjakannya sangat tajam dan menikung sehingga pengendara sulit melintas. "Pengendara jadi khawatir melintas.

Karena dinilai membahayakan," ujarnya, Senin (9/11) kemarin.

Kata dia, kekhawatiran pengendara semakin menjadi-jadi saat melintas di jembatan lantaran tidak dilengkapi dengan dinding pengaman. Jika sedikit saja salah, pengendara bisa terjun ke sungai. "Jalan juga gelap. Harapannya biar jalan ini diperbaiki," ungkapnya.

Sementara, Perbekel Desa Bunutin Ida I Dewa Made Rai Adnyana menjelaskan kondisi jalan ini sudah sering dikeluhkan warga. Keluhan ini sejatinya telah disampaikan ke DPRD Bangli dalam rapat kerja belum lama ini. "Kita berharap pemerintah turun melakukan pengecekan. Kita ingin jalan ini nantinya umur panjang," pungkasnya. (kmb45)



Bali Post/sos

RUSAK - Jalan yang menghubungkan Banjar Slati Desa Bunutin - Banjar Tanggahan Talangjiwa Desa Demulih Susut dikeluhkan warga karena rusak berat.

Edisi : Selasa, 16 NOV 2015

Hal : 8



Temuan DPRD Bali

Aset Tanah Pemprov Diduga Diperjualbelikan

Bangli (Bali Post) -

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bali belum lama ini sempat turun ke Bangli untuk mengecek aset yang di Desa Pengotan. Hasilnya, dewan menemukan adanya beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh warga untuk perkebunan. Bahkan warga yang memanfaatkan lahan provinsi itu tidak mengantongi SIM yang dikeluarkan Pemkab Bangli. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi Bali asal Bangli I Wayan Gunawan, Senin (9/11) kemarin.

Dia menjelaskan dari 1,8 hektar lahan yang ada di Desa Pengotan, beberapa bidang dimanfaatkan oleh Unud untuk kajian pengembangan rumput

gajah. Beberapa bidang lainnya ada yang digunakan untuk pasar desa, sekolah serta menampung eks pengungsi dari Timtim. Selain itu ada juga digunakan untuk

perkebunan oleh masyarakat.

Dari hasil pengecekannya saat itu, diketahui bahwa warga yang memanfaatkan lahan itu ternyata tidak mengantongi SIM

yang dikeluarkan Pemkab Bangli. "Dari sejumlah lahan yang dikerjakan, tidak ada yang mengantongi SIM. Padahal sesuai PP 27/2014 yang mengerjakan lahan pemerintah harus memiliki SIM," ujarnya.

Tak hanya itu, Gunawan juga menduga ada beberapa aset di sana yang diperjualbelikan. Hanya dia tidak bisa memaparkan dengan jelas berapa luasnya. Sebab saat turun ke lapangan,

pihaknya tidak berhasil menemui penggarapnya. Sementara itu, sebagai tindak lanjut hal tersebut, politisi Golkar ini pun berharap Pemprov cepat merespons kondisi itu.

"Kita juga akan segera mengundang jajaran Pemkab/Kota se-Bali untuk membahas masalah aset termasuk SIM yang telah dikeluarkan. Kita akan coba tata ulang aset yang ada," terangnya. (kmb40)

Edisi : Selasa, 10 November 2015
Hal : 8



Terkait Rencana Reklamasi Teluk Benoa

Tim IX PHDI Mesti Jaga

Kawasan Suci

BALI memiliki banyak kawasan suci. Adalah kewajiban masyarakat Bali menjaga dengan baik kawasan suci, di mana pun itu. Jangan justru dikorbankan untuk kepentingan pemilik modal. Seperti rencana reklamasi di Teluk Benoa. Padahal sudah tidak terbantahkan lagi bila Teluk Benoa merupakan kawasan suci bagi umat Hindu. "Kita seharusnya menjaga kawasan," ujar Ida

Bagawan Ratu Manik, di Denpasar, Senin (9/11) kemarin.

Menurut Ida Bagawan, kawasan suci yang digunakan untuk tujuan tidak semestinya, tentu akan berdampak secara energi. Misalnya di kawasan suci Teluk Benoa yang akan direklamasi untuk tujuan pariwisata. Tidak saja berpengaruh pada aspek kesucian, megaprojek itu juga dipastikan menyedot sum-

ber daya yang dimiliki Bali. "Air misalnya, untuk memenuhi kebutuhan di Denpasar dan Badung saja sudah berat sekali PDAM. Musim kering sudah berkurang airnya. Kalau muncul megaprojek yang menghadirkan ratusan ribu pekerja dan jutaan wisatawan tentu akan menyedot juga," jelasnya.

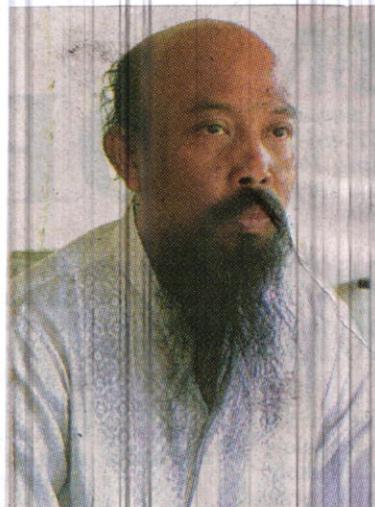
Ida Bagawan mengaku khawatir sebab perusahaan besar memiliki

daya beli lebih tinggi ketimbang masyarakat. Bisa saja, air akan lebih banyak dibeli oleh perusahaan besar itu, sehingga tidak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, keinginan investor untuk mereklamasi juga dipertanyakan. Sebab, sudah banyak pemberitaan mengenai tingkat hunian hotel yang menurun di Bali.

Hal. 19
Semakin Sulit

"Varuna sebagai dewa pembebas dosa, kepadanya umat manusia meminta perlindungan, Varuna juga sebagai sumber pemberi kebahagiaan, lautan adalah tempat suci dari Varuna, dari sana Varuna bisa memusnahkan segala bentuk kejahatan dan segala musuh yang merusak bumi."

Ida Pandita Mpu
Siwa Budha Daksa Darmita



Edisi : Selasa, 10 November 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Semakin Sulit

Dari Hal. 1

"Terus apa yang dicari lagi? Kalau itu dibangun lagi di sana, jadi itu akan membuat persaingan semakin sulit untuk hotel. Itu secara ekonomi. Kalau secara keagamaan, kita harus menjaga pertwi ini. Pertwi ini seperti ibu, kita cukuplah mendapatkan air susu ibu untuk kehidupan tetapi tidak harus lagi menyiksa ibu untuk mendapatkan hal-hal lain," paparnya.

Ida Bagawan menambahkan, ketika investor masuk maka yang pertama kali hilang adalah ibu pertwi. Di negara mana pun, orang-orang yang tidak menghargai ibu pertwi akan segera mendapatkan kehancuran. Khusus di Bali, dampak pembangunan oleh investor akan menghilangkan tempat-tempat yang sejak dulu disakralkan oleh umat.

"Jadi, segala sesuatu sebaiknya dipikirkan kembali. Keputusan terhadap tanah Bali ini hendaknya tidak diputuskan satu dua orang, walaupun dalam jabatannya sekarang mewakili Bali. Kalau memang itu hendak diputuskan hendaknya diadakan referendum. Artinya semua orang Bali turut bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan," tegasnya.

Sementara itu, Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmita mengingatkan Tim IX PHDI yang kini sedang melakukan kajian mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa, bahwa keagungan laut sebagai stana Dewa Varuna harus tetap dijaga. Ditemui Senin kemarin, Ida Pandita mengatakan Teluk Benoa sebagai bagian dari laut merupakan bagian dari stana Dewa Varuna, sehingga umat Hindu harus menjaga keharmonisan kawasan tersebut. Ia juga menjabarkan penjelasan sejumlah sloka pada kitab suci Rg Veda, Mandala I sukta XVII. "Varuna sebagai dewa

pembebas dosa, kepadanya umat manusia meminta perlindungan, Varuna juga sebagai sumber pemberi kebahagiaan, lautan adalah tempat suci dari Varuna, dari sana Varuna bisa memusnahkan segala bentuk kejahatan dan segala musuh yang merusak bumi."

Tokoh Hindu yang juga Wakil Dharma Adyaksa PHDI Pusat ini menjelaskan, selama ini umat Hindu di Bali sudah mengimplementasikan ajaran dari Rg Veda tersebut, melalui berbagai ritual seperti *melasti* dan *mapekelem*, untuk menjaga keharmonisan alam. "Sekarang pengurugan laut di Teluk Benoa seluas 800 hektar itu, sama dengan menghancurkan stana Dewa Varuna. Nah kalau itu terjadi maka dari laut itu sendiri Dewa Varuna bisa menunjukkan langsung karma dari perbuatan manusia, seperti abrasi yang semakin parah atau tsunami," ucap Ida Pandita saat ditemui di Geria Agung Suka-wati, siang kemarin.

Doktor ilmu agama ini juga berpesan agar Tim IX PHDI bisa lebih banyak menggali sumber dari susastra Hindu, yang menegaskan dampak dari rencana reklamasi. Apalagi laut merupakan tempat berbagai kemakmuran, kalau dijaga tentu kita akan mendapat berkahnya. "Nah sekarang bila ingin menjaga Teluk Benoa kan bisa dengan memperluas hutan bakau, yang jelas-jelas buah dan daunnya bisa dijadikan herbal, serta bisa sebagai benteng abrasi yang selama ini dikhawatirkan," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa di Bali saat ini sudah sesak dengan akomodasi pariwisata. Bahkan pembangunan tersebut sudah banyak yang mendobrak batas-batas kawasan suci. Sementara pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga, justru tutup mulut, mata dan telinga. (rin/nik)

Edisi : Selasa, 10 November 2015

Hal : 19